

PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI, TINDAKLANJUTI HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Eva Novita Sari Naibaho¹, Yunita Kurnia Shanti²
Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Email: eva.naibaho26051996@gmail.com, Kurniay25@gmail.com

ABSTRACT

The purposes of this research is to analyze the influence of government auditing result such as audit finding, opinion, post-audit rectification effort to the level corruption of government department/institution in 2016 - 2019. The population in this study was audit results and overview of semester examination results of Badan Pemeriksaan Keuangan and annual report Komisi Pemberantas Korupsi. The sampling method uses purposive sampling, based on criteria sample. The number of samples 36 in 4 years observation. The data analysis method uses mutiplier regresi linear. The results of the study show that partially audit finding, audit opinion, and post-audit rectification effort has effect on corruption level in government department/institution. Simultaneously, these variables have significant influence on corruption level. This show that audit results can be uses as references to find indication of froud, especially corruption in government department/institution.

Keywords: *audit findings, opinions, post – audit rectification effort, corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh berbagai oknum, baik pejabat publik maupun para pengusaha, penegak hukum hingga pada level kepala desa, yang menghambat kemajuan negara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen dan integritas para penyelenggara negara (Baidi, 2019). Menurut Undang – Undang No 20 Tahun 2001 “Korupsi adalah setiap orang yang melakukan tindakan untuk tidak sesuai dengan hukum, memperkaya diri sendiri atau melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dan merugikan orang lain, negara dan perekonomian negara serta menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki karena memiliki kekuasaan dan kedudukan, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.”

Transparency Indonesia mencatat kasus korupsi di Indonesia berada pada urutan ke 80 dari 189 negara yang ikut terlibat, dan kondisi ini membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kasus Korupsi di Indonesia memang semakin menurun, tetapi kasus korupsi tersebut tetap ada, dan itu merugikan negara khususnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Kementerian/Lembaga merupakan penyelenggara negara yang melakukan pengelolaan anggaran dan menjalankan pelayanan publik (Yuliyannah & Setyaningrum, 2016). Oleh karena Kementerian/Lembaga melakukan pengelolaan anggaran, sehingga perlu di lakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan pemeriksa keuangan adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta memberikan hasil pemeriksaan yaitu berupa temuan audit, rekomendasi, opini audit serta tindak lanjut hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah. Jika dalam melakukan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan temuan yang berunsur pidana maka sesuai dengan Undang – Undang No 15 Tahun 2004 terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan harus meneruskan kepada pihak yang berwenang yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam

penelitian ini Saya lebih memilih Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya akan disingkat KPK, karena tugasnya lebih khusus dalam penanganan korupsi. KPK melakukan pemberantasan korupsi menurut UU NO 19 Tahun 2011 berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan – tindakan pencegahan dan melakukan penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam menjalankan dan mengemban tugasnya KPK akan meminta ijin dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang dibentuk oleh Presiden (Badjuri, 2011).

Kasus korupsi yang terjadi di Kementerian/Lembaga disebabkan karena lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran di instansi tersebut (KPK,2014) yang dikutip oleh (Yuliyannah & Setyaningrum, 2016). Berdasarkan kasus yang ditangani oleh KPK untuk korupsi di Kementerian/ Lembaga untuk tahun 2017 hingga 2018 berada di posisi No dua (2) berdasarkan instansi. Menurut KPK,2014 yang dikutip oleh (Yuliyannah & Setyaningrum, 2016), Kementerian/Lembaga rawan terkena kasus korupsi dalam hal gravitasi, suap menyuap, dan penyalahgunaan wewenang dan (Yuntho, 2019) menambahkan alasan Kementerian/Lembaga mudah melakukan tindak korupsi yaitu terbukanya peluang untuk melakukan perekrutan tender, mengubah kebijakan peraturan menteri.

Fenomena kasus korupsi yang terjadi akhir tahun 2020 lalu yang menggemparkan publik Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap dugaan kasus korupsi bantuan sosial yang mencapai 17 M dan disusul berita Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo terkait benih lobster mendapatkan uang 3,4 M dan 100.000 US Dollar (Halim, 2020). Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar dengan pengecualian kepada dua Kementerian tersebut pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK sejalan dengan ditemukannya tindak pidana korupsi oleh KPK.

Menurut Hua dan Gong yang dikutip oleh (Liu & Lin, 2012) tujuan dasar audit pemerintah adalah untuk memantau, memeriksa, dan menilai akuntabilitas dengan kata lain dengan memantau, memeriksa dan menilai kinerja pemerintah sehingga audit pemerintah dapat menjadi dasar untuk mendeteksi, mengetahui, atau mencegah adanya tindak pidana korupsi. Sehingga menurut penelitian (Liu & Lin, 2012) temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah China, sehingga dianggap mampu sebagai indikator awal terjadinya kasus korupsi, tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian (Rini & Damiati, 2017) yang menyatakan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tindak korupsi di pemerintah daerah Indonesia, karena temuan audit salah satunya temuan kelemahan sistem pengendalian internal tidak menyebabkan kerugian materil. Menurut Sukrisno dan Hoesada yang dikutip oleh (Utomo, Diana, & Afifudin, 2018) opini auditor adalah pendapat auditor terkait dengan kewajaran laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.. Menurut penelitian (Utomo, Diana, & Afifudin, 2018) berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga, tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rini & Damiati, 2017) yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga. Menurut (Bastian, 2018) Dengan adanya tindak lanjut hasil audit menunjukkan bahwa laporan pemeriksaan akan lebih efektif jika rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh organisasi. Ketika pihak pemerintah atau pihak yang berkepentingan didalam organisasi pemerintah melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh auditor maka akan memperbaiki kesalahan dalam penyelenggaraan negara dan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kecurangan berupa penyimpangan, penyelewengan dan terjadinya kesalahan yang berulang. (Liu & Lin, 2012) menyatakan tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah China, tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardahayati, Sarwani, & Hayat, 2019) yang menyatakan tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah

TINJAUAN PUSTAKA

Teori triangle diperkenalkan oleh Donald R.Cressey yaitu seseorang melakukan kecurangan karena dilandasi pada 3 faktor yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Menurut Albrech 2011 yang dikutip oleh (Faisal, 2018) tekanan disebabkan karena faktor financial,

tekanan pekerjaan dan memiliki kebiasaan buruk seperti narkoba, judi dan mabuk. Peluang adalah kesempatan seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Rasionalisasi adalah alasan seseorang untuk melakukan tindakan seseorang dengan membenarkan perbuatannya

Teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dengan agen yaitu antara dua atau lebih, kelompok atau organisasi kepada pihak lain Jensen & Meckling yang dikutip oleh (Sutiani, 2018). Didalam penelitian ini yang menjadi agen adalah pemerintah dan prinsipal adalah masyarakat yang diwakili oleh DPR. Agen diberi mandat oleh prinsipal untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal, tetapi sering sekali agen menyimpang dari kepentingan prinsipal dan lebih mengutamakan kepentingan agen, sehingga sering sekali terjadinya penyimpangan yang merugikan prinsipal. Hal ini terjadi dikarenakan agen lebih banyak memiliki informasi dibandingkan dengan prinsipal sehingga terjadi asimetri informasi. Sehingga dibutuhkan bantuan pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan atas kinerja agen sehingga asimetri informasi antara agen dan prinsipal dapat berkurang.

Temuan Audit

Temuan merupakan hasil dari adanya pemeriksaan. Ketika auditor memeriksa suatu instansi, auditor menemukan sebuah permasalahan yang menyimpang dari standar akuntansi yang berlaku umum Bastian (2018 :316). Temuan yang ditemukan berupa temuan atas pengendalian internal, salah saji material, ketidakefisienan dalam bekerja, temuan ketidakpatuhan atas peraturan perundang -undangan yang selanjutnya harus disajikan menurut elemen temuan yang terdiri dari kriteria, kondisi, sebab dan akibat. Temuan pemeriksaan dapat mengindikasikan adanya kecurangan tanpa menjelaskan dugaan kecurangan tersebut (Husnah, Rahayu, & Triyanto, 2016) yang mengutip standar pemeriksaan keuangan negara.

Temuan terbagi menjadi 2 yaitu temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan akan peraturan perundang – undangan. Menurut Permendagri no 4 tahun 2008 seperti yang dikutip oleh (W & Probohudono, 2015), bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi kriteria pemberian opini melalui evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Temuan ketidakpatuhan akan peraturan perundang – undangan. Menurut Nosworthy yang di kutip oleh (Masyitoh, Wardhani, & Setyaningrum, 2015) berpendapat bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk meninjau apakah hal yang dikerjakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan lebih lanjut Raman dan Wilson yang dikutip oleh (Masyitoh, Wardhani, & Setyaningrum, 2015) menambahkan tindakan pemeriksaan yang dilakukan untuk instansi pemerintah untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta memimilisir tindakan pemborosan, kecurangan maupun tindak korupsi. Pemeriksaan terhadap kepatuhan peraturan perundang – undangan merupakan salah satu kriteria untuk menunjukkan kualitas dari suatu laporan hasil pemeriksaan atas instansi pemerintah dan mendukung program anti korupsi.

Opini

Pemberian pendapat (opini) merupakan hasil akhir dari auditor dalam memeriksa laporan keuangannya untuk memuat kewajaran suatu laporan keuangan yang disajikan klien sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (Shanti & Kusumawardhani, 2020). Wajar artinya laporan keuangan tersebut terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dan kesalahan dari laporan keuangan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, hal ini dikarenakan auditor tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan melainkan berdasarkan sampel

Adapun kriteria dalam memberikan opini adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektifitas sistem pengendalian.

Ada 5 jenis opini yaitu 1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan, (3) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (4) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), (5) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

Tindaklanjut Hasil Audit

Temuan yang ditemukan oleh BPK di Kementerian/Lembaga harus ditindaklanjuti oleh *auditee* sesuai dengan indentifikasi yang direkomendasikan oleh BPK sebagai proses pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (Bastian, 2014: 15). Tindaklanjut hasil audit merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPK setelah memberikan hasil pemeriksaan dan merupakan langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada *auditee* dengan tujuan perbaikan dalam pelaksanaan perencanaan dan mengevaluasi kinerja seperti yang dinyatakan oleh Agung Rai yang dikutip oleh (Rini & Damiati, 2017).

Menurut (Masyitoh, Wardhani, & Setyaningrum, 2015) adalah semakin tinggi upaya untuk melaksanakan rekomendasi hasil audit, menunjukkan tingginya upaya perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga apabila upaya perbaikan dilakukan terus menerus akan meminimalkan adanya korupsi.

Perbaikan setelah adanya proses audit jauh lebih penting daripada mendeteksi atas temuan audit tersebut karena upaya untuk melakukan pembetulan audit dapat meningkatkan efektifitas proses audit (Liu & Lin, 2012), kemudian lebih lanjut (Verawaty, Puspanita, & Sularti, 2019) menambahkan bahwa tahapan pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor dapat diimplementasikan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Korupsi di Kementerian/Lembaga

Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi seperti menjual kekayaan negara, penyuapan dan pencurian dana – dana pemerintah yang dilakukan oleh pejabat publik (Tuanakotta, 2018 :226). Menurut Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston pengertian korupsi secara luas yang dikutip oleh (Priyono, 2018 :23) menyatakan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap ataupun pemberian hadiah, ataupun melakukan tindak kecurangan didalam suatu negara. Dalam undang – undang No 20 tahun 2001 korupsi dibagi menjadi kedalam 30 jenis / bentuk korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan. Korupsi dapat berdampak bagi negara dan masyarakat karena terhambatnya tujuan negara, sehingga akan mengganggu nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa ((Suhendar, 2020) yang mengutip pernyataan Arya Maheka dan Ermansjha Djaja. Drs, Soejono dan Dr. Hidayat Nur Wahid yang dikutip oleh (Ruslin, 2017) dampak korupsi bagi masyarakat ialah sebagai berikut:

1. Merusak sistem tatanan masyarakat
2. Penderitaan masyarakat karena kehancuran perekonomian negara
3. Tingkat kemiskinan semakin bertambah
4. Hilangnya rasa percaya publik kepada penguasa negara
5. Kualitas pelayanan publik buruk
6. Mutu pendidikan kurang

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berpikir adalah untuk menjelaskan secara teori hubungan antara variabel independen dan dependhuen yang akan diteliti, yang gunanya untuk memberikan penjelasan

sementara terhadap gejala – gejala yang menjadi obyek permasalahan (Sugiyono,2018:60). Dalam penelitian ini hipotesa yang disusun yaitu H1: Diduga temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga, H2: Diduga opini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga, H3: Tindaklanjut hasil audit berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga. H4: Diduga temuan audit, opini, tindaklanjut hasil pemeriksaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga,

METODE

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dimana datanya dapat diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas Kementerian/Lembaga BPK dan Laporan Tahunan KPK . Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan *software eviews*

Dalam penelitian ini populasi data saya dapat diambil dari beberapa sumber data yaitu laporan hasil pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikarenakan dibutuhkan instansi – instansi terkait untuk melakukan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi terhadap variabel – variabel penelitian (Yuliyannah & Setyaningrum, 2016). Menurut Sugiyono (2016: 215) “sampel adalah bagian dari populasi. Bila populasinya besar, maka peneliti tidak dapat mempelajari secara keseluruhan penelitian oleh karena itu diperlukanlah sampel”. Metode penentuan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah menentukan sampel dengan kriteria tertentu.

Proses seleksi sampel dengan metode *purposive sampling*

Keterangan	Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
Sampel merupakan Kementerian/Lembaga Indonesia		87
Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini dari BPK, memiliki temuan audit, dan memiliki data tindaklanjut hasil audit yang dibatasi dalam Rupiah	(1)	86
Kementerian/Lembaga yang tidak dilikuidasi	(4)	82
Kementerian/Lembaga yang terlibat kasus tindak pidana korupsi selama 4 tahun berturut – turut, yang diperoleh dari laporan tahunan KPK dari tahun 2016 – 2019	(73)	9
Jumlah sampel		9
Tahun amatan (2016 -2019)		4
Jumlah sampel		36

Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Menurut Sugiyono (2016: 137) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh sipeneliti. Penelitian ini menggunakan beberapa data dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantas Korupsi. Data tersebut dapat di akses dari e-mail dan website Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantas Korupsi

Variabel dan Pengukuran

Variabel-variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 yaitu variabel dependen, variabel independen. Variabel tersebut antara lain;

1. Temuan audit. Temuan audit dapat menjadi dugaan awal adanya indikasi kecurangan (Liu & Lin, 2012). Temuan audit yang terdapat didalam laporan hasil pemeriksaan BPK yaitu temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan akan peraturan perundang - undangan. Indikator Variabel ini diukur dengan jumlah temuan audit disesuaikan dengan jumlah temuan perkapita
2. Opini audit. Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Indikator variabel ini diukur dengan opini wajar tanpa pengecualian mendapat nilai 1 , selain opini wajar tanpa pengecualian mendapatkan nilai 0 (Rini & Damiati, 2017)
3. Tindaklanjut hasil pemeriksaan. Tindaklanjut hasil pemeriksaan adalah sejauhmana rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti. Indikator pengukuran variabel ini adalah dengan logaritma natural penyetoran penyerahan aset negara dibatasi dalam nilai rupiah (Sutiani, 2018)
4. Tingkat Korupsi. Kementerian/ Lembaga yang dalam tahap penyidikan, penindakan, dan penuntutan di KPK. Indikator pengukuran variabel ini adalah dengan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK ((Wardahayati, Sarwani, & Hayat, 2019)

Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan meliputi statistik diskriptif (Ghozali & Ratmono, 2020) uji deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier sederhana meliputi uji normalitas, uji heterokedasitas dan uji multikolonieritas. Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda data panel. Menurut Ghozali & Ratmono (2020:53) “regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen”. Data panel adalah data yang diamati sepanjang waktu atau dapat dikatakan sebagai data gabungan antara data (runtut waktu) dan *cross section* (silang waktu) (Ghozali & Ratmono, 2020:193). Dalam menentukan regresi linear berganda dibutuhkan 3 pendekatan yaitu pendekatan *common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)*, dan *random effect model (REM)*. Untuk menentukan model mana yang akan terpilih adalah dengan menggunakan *Uji Chow*, *Uji Housman* dan *Uji Lagrange Multiplier*. Persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Uji statistik dekriptif
- b. Uji model terpilih *uji chow*, *uji housman*, *uji lagrange multiplier*
- c. Uji asumsi klasik yaitu normalitas, heterokedasitas dan multikoloniaritas, autokorelasi
- d. Uji koefisien determinasi
- e. Uji regresi linear berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan penelitian sesuai tehnik analisa data yang digunakan oleh peneliti. Objek dalam penelitian ini Laporan Hasil Pemeriksaan, Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK, dan Laporan Tahunan KPK. Jumlah sampel sebanyak 36 sampel dalam 4 tahun amatan.

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel Uji Statistik Deakriptif

	KORUPSI	TEMUAN	OPINI	THA
Mean	2.194444	0.021126	0.916667	22.85947
Median	2.000000	0.021700	1.000000	23.05292
Maximum	6.000000	0.035400	1.000000	26.57340
Minimum	1.000000	0.007600	0.000000	17.79840
Std. Dev.	1.470072	0.007496	0.280306	1.967473
Skewness	1.246018	0.005144	-3.015113	-0.515799
Kurtosis	3.709558	2.226092	10.09091	3.136235
Jarque-Bera	10.07058	0.898560	129.9669	1.624131
Probability	0.006504	0.638088	0.000000	0.443940
Sum	79.00000	0.760530	33.00000	822.9407
Sum Sq. Dev.	75.63889	0.001967	2.750000	135.4832
Observations	36	36	36	36

Dari tabel diatas dengan data yang diobservasi adalah 36 data untuk setiap variabel independen yaitu variabel temuan, opini, dan tindaklanjut hasil audit yang diprosikan dengan THA dan variabel dependen korupsi selama 4 tahun yaitu tahun 2016 hingga 2019. Dapat diketahui variabel temuan memiliki nilai minimum 0,007600 dengan nilai maksimum sebesar 0,035400, dengan nilai rata – rata 0.021126 sedangkan standar deviasi 0,017496. Variabel opini yang menggunakan dummy sebagai skala ukurnya untuk nilai maksimum mendapatkan nilai 1, dan nilai minimumnya adalah 0, dengan nilai rata – rata 0,916667 artinya rata – rata kementerian mendapatkan opini yang baik dari BPK, standar deviasinya 0.280306. Variabel tindaklanjut hasil audit yang diprosikan oleh THA memiliki nilai maksimum 26,57340 nilai minimum 17,79840, nilai rata – ratanya adalah 22,85947, dengan standar deviasinya adalah 1.967473. Variabel dependen yaitu korupsi memiliki nilai maksimum 6,000000 , minimum 1,000000, *mean* 2,194444 dengan standar deviasi 1,470072

4.2 Pemilihan Model

4.2.1 Model *Common Effect Model (CEM)*

Tabel CEM

Dependent Variable: KORUPSI
Method: Panel Least Squares
Date: 09/05/21 Time: 22:53
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficie nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.894534	2.919957	-2.703647	0.0109
TEMUAN	4.304560	32.14199	-0.133923	0.8943
OPINI	1.492869	0.807111	1.849644	0.0736
THA	0.385462	0.125118	3.080780	0.0042

R-squared	0.278635	Mean dependent var	2.194444
Adjusted R-squared	0.211007	S.D. dependent var	1.470072
S.E. of regression	1.305795	Akaike info criterion	3.475940
Sum squared resid	54.56322	Schwarz criterion	3.651887
	-	Hannan-Quinn criter.	3.537350
Log likelihood	58.56693	Durbin-Watson stat	0.420141
F-statistic	4.120122		
Prob(F-statistic)	0.014044		

4.2.2 Model Fixed Effect Model (FEM)

Tabel FEM

Dependent Variable: KORUPSI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/05/21 Time: 22:57
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 9
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.256926	2.620303	-3.151134	0.0043
TEMUAN	45.67718	21.49538	2.124977	0.0441
OPINI	3.687152	0.512572	7.193436	0.0000
THA	0.267133	0.121135	2.205245	0.0373

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.855546	Mean dependent var	2.194444
Adjusted R-squared	0.789339	S.D. dependent var	1.470072
S.E. of regression	0.674732	Akaike info criterion	2.312198
Sum squared resid	10.92630	Schwarz criterion	2.840038
Log likelihood	-29.61956	Hannan-Quinn criter.	2.496428
F-statistic	12.92213	Durbin-Watson stat	2.054334
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.2.3 Model *Random Effect Model (REM)*

Tabel REM

Dependent Variable: KORUPSI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 09/05/21 Time: 22:59
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 9
 Total panel (balanced) observations: 36
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.967269	2.310596	-3.880933	0.0005
TEMUAN	32.17877	20.41387	1.576319	0.1248
OPINI	3.233136	0.493724	6.548468	0.0000
THA	0.328888	0.104218	3.155761	0.0035

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.875960	0.6276
Idiosyncratic random		0.674732	0.3724

Weighted Statistics			
R-squared	0.595832	Mean dependent var	0.788692
Adjusted R-squared	0.557942	S.D. dependent var	1.142579
S.E. of regression	0.759672	Sum squared resid	18.46725
F-statistic	15.72503	Durbin-Watson stat	1.038016
Prob(F-statistic)	0.000002		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.130037	Mean dependent var	2.194444
Sum squared resid	65.80306	Durbin-Watson stat	0.291313

4.3 Uji Model

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow adalah uji untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* dengan *common effect model*. Cara melakukan pengujian adalah dengan melihat *probability* yang diperoleh dari uji *test redundant fixed effects model* dan akan didapatkan model yang sesuai dengan penelitian. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

H₀: jika *Chi square* < 0.05 maka yang dipilih adalah *Fixed effect Model*

H₁: jika *chi square* > 0,05 maka yang dipilih adalah *Common Effect Model*

Tabel Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.981247	(8,24)	0.0000
Cross-section Chi-square	57.894730	8	0.0000

Dari data diatas maka H₀ diterima karena *cross- section Chi – square*nya 0.0000 < 0.05, sehingga yang dipilih adalah model *Fixed Effect Model*.

4.3.2 Uji Housman

Uji *Housman* adalah uji yang digunakan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Cara pengujiannya dengan melihat *probability* di

uji *correlated random effects -hausman test*. Maka akan didapatkan model terbaik untuk penelitian ini. Adapun hipotesis untuk uji *hausman* adalah sebagai berikut:

H_0 : jika *chi square*nya < 0.05 , maka yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*

H_1 : Jika *chi square*nya $> 0,05$ maka yang dipilih adalah *Random Effect Model*

Tabel Uji Housman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.563938	3	0.0090

Dari data tabel uji *hausman* diatas maka yang diterima adalah H_0 , karena *cross section random* $<$ taraf signifikan atau $0.0090 < 0.05$, sehingga model yang terbaik adalah model *fixed effect model*. Karena dari 2 pengujian memilih *fixed effect model* yang terbaik sehingga tidak diperlukan lagi untuk melakukan uji LM.

4.4. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dilakukan guna mengetahui layak atau tidaknya suatu data dalam penelitian untuk dianalisis, uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, dan Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi

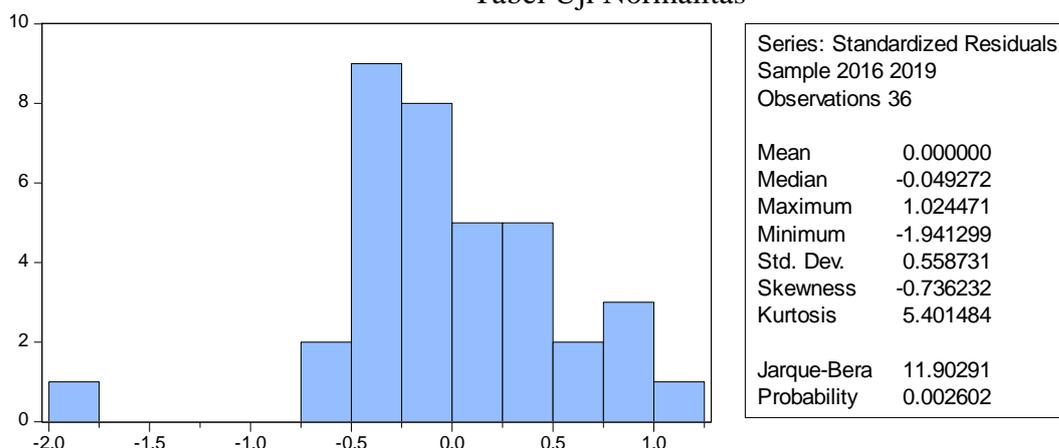
4.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali & Ratmono (2020:145) “uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Cara untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : jika nilai *jarque – bera* $<$ nilai *chi-square* tabel dan nilai *probability* $>$ taraf signifikan, maka dikatakan data tersebut berdistribusi normal

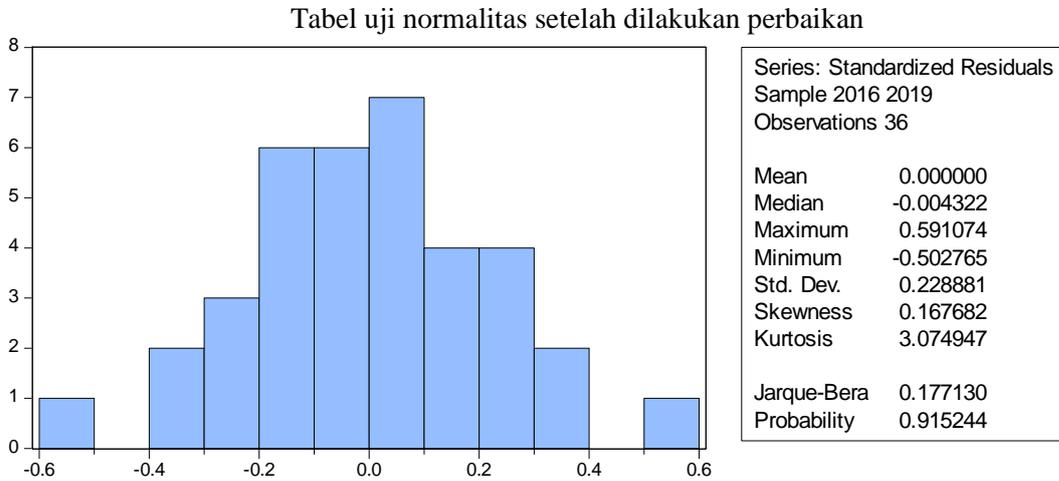
H_1 : jika nilai *jarque – bera* $>$ nilai *chi-square* tabel dan nilai *probability* $<$ taraf signifikan, maka dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal

Tabel Uji Normalitas



Dari data tabel uji normalitas diatas memiliki nilai *probability* $0.002602 < 0,05$, dan *jarque -Bera* $11,90291 >$ dari *chi square* dengan *df* 2 yaitu 5, 9915 sehingga data dapat dikatakan H_0 diterima dan H_1 ditolak atau data tersebut dapat dikatakan tidak berdistribusi

normal. Sehingga harus dilakukan perbaikan data. Dengan melakukan perbaikan data yaitu dengan melakukan log variabel temuan dan log variabel korupsi sehingga didapatkan .



Setelah dilakukan perbaikan data maka dapat dilihat bahwa *jarque – bera* lebih kecil dibandingkan dengan tabel *chi-square* atau $0,177130 < 5,9915$ dan *probability* lebih besar dari taraf signifikan $0,915244 > 0,05$, maka H_1 dapat diterima dan H_0 ditolak artinya data sudah berdistribusi normal

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikloniaritas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi yaitu di atas 0,80 antara variabel independen (Ghozali & Ratmono,2020:72).

Tabel Uji Multikloniaritas

	TEMUAN	OPINI	THA
TEMUAN	1.000000	-0.008464	0.394232
OPINI	-0.008464	1.000000	-0.204929
THA	0.394232	-0.204929	1.000000

Dari data tabel diatas uji multikloniaritas diatas dapat kita ketahui bahwa data penelitian ini tidak adanya korelasi antara variabel independen satu sama lain karena semuanya kurang dari 0,80 atau tidak terjadinya multikloniaritas

4.4.3 Uji Heterokedasitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini dilakukan uji statistik dengan menggunakan Uji *white*. Dimana akan dikatakan terbebas dari heteroskedasitas apabila nilai signifikansinya diatas 5% ($sig > 0,05$).

Tabel Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.784104	Prob. F(8,27)	0.6205
Obs*R-squared	6.786975	Prob. Chi-Square(8)	0.5598
Scaled explained SS	4.844316	Prob. Chi-Square(8)	0.7741

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa nilai *probability chi – square* adalah 0,5598 dan taraf signifikannya adalah 0,05. Sehingga *probability chi – square* > taraf signifikan atau $0,5598 > 0,05$. Maka penelitian ini lolos dari heteroskedastisitas.

4.4.4 Uji Auto korelasi

Uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah adanya variabel pengganggu dalam penelitian. Dalam melakukan uji autokorelasi seringkali menggunakan uji DW atau *Durbin Watson*. Dinyatakan lulus uji autokorelasi jika Uji Dw berada di Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan 4-du, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

Tabel Uji Autokorelasi

R-squared	0.855546	Mean dependent var	2.194444
Adjusted R-squared	0.789339	S.D. dependent var	1.470072
S.E. of regression	0.674732	Akaike info criterion	2.312198
Sum squared resid	10.92630	Schwarz criterion	2.840038
Log likelihood	-29.61956	Hannan-Quinn criter.	2.496428
F-statistic	12.92213	Durbin-Watson stat	2.054334
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel uji autokorelasi diatas dapat kita ketahui bahwa nilai DW 2,054334, akan dibandingkan dengan tabel signifikan 0,05 sampel 36 data dan jumlah tabel independen ($k=3$) = 3.36, maka diperoleh nilai dl = 1.6539 dan du = 1.2358. Nilai DW 2,054334 lebih besar dari batas bawah atau $du = 1,2358$ dan kurang (dari $4 - du$) atau $4 - 1,2358 = 2,7642$ yaitu $du < DW < (4 - du)$ atau $1,2358 < 2,054334 < 2,7642$. Maka kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi.

4.5 Uji Regresi Linear Berganda

4.5.1 Uji Koefisien Detarminasi (R²)

Uji Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai R² berkisar antara 0 – 1, semakin mendekati angka 1 maka hubungan antara variabel dependen dengan independen semakin kuat, sedangkan sebaliknya semakin mendekati angka 0, maka hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen semakin lemah (Ghozali & Ratmono,2020:55).

Tabel Uji R²

R-squared	0.855546	Mean dependent var	2.194444
Adjusted R-squared	0.789339	S.D. dependent var	1.470072
S.E. of regression	0.674732	Akaike info criterion	2.312198
Sum squared resid	10.92630	Schwarz criterion	2.840038
Log likelihood	-29.61956	Hannan-Quinn criter.	2.496428
F-statistic	12.92213	Durbin-Watson stat	2.054334
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel uji R² diatas dapat kita lihat bahwa nilai R squared sebesar 0,78 atau 78% terhadap Y. Artinya pada penelitian ini variabel independen (temuan audit, opini, dan tindaklanjut hasil audit) mampu menjelaskan variabel dependen (tingkat korupsi di Kementerian/Lembga) sebesar 78 %, sedangkan 22 % lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan didalam penelitian ini.

4.5.2 Uji parsial (T)

Uji Parsial atau uji t adalah untuk melakukan pengujian secara masing – masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.256926	2.620303	-3.151134	0.0043
TEMUAN	45.67718	21.49538	2.124977	0.0441
OPINI	3.687152	0.512572	7.193436	0.0000

THA 0.267133 0.121135 2.205245 0.0373

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Temuan audit terhadap tingkat korupsi di Kementerian/ Lembaga
 Dari tabel 4.17 diatas t_{hitung} 0,178909 jika dibandingkan dengan t_{tabel} dengan taraf signifikan 0,05, $df = (n - k - 1) = (36 - 3 - 1) = 32$ yaitu sebesar 1,639389 atau t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} 2,124977 > 1,639289. Nilai probabilitas signifikan sebesar 0,8595 lebih besar daripada taraf signifikan 0,05 atau 0,041 < 0,05. Maka H_1 diterima. Dengan demikian temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga.
2. Pengaruh Opini tingkat korupsi di Kementeriaan/Lembaga
 Dari tabel 4.17 uji t diatas t_{hitung} 6.409764 jika dibandingkan dengan t_{tabel} dengan taraf signifikan 0,05, $df = (n - k - 1) = (36 - 3 - 1) = 32$ yaitu sebesar 1,639389 atau t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel} 7,193436 > 1,639389. Nilai probabilitas signifikan opini 0,0000 juga lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 atau 0,0000 < 0,05. Maka H_2 diterima, opini auditor BPK berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga
3. Tindaklanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga
 Dari tabel diatas t_{hitung} 2,205245 jika dibandingkan dengan t_{tabel} dengan taraf signifikan 0,05, $df = (n - k - 1) = (36 - 3 - 1) = 32$ yaitu sebesar 1,639389 atau t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel} 2,205245 > 1,639389. Nilai probabilitas signifikan tindaklanjut hasil audit yang diprosikan oleh tha adalah 0,0000 juga lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 atau 0,00373 < 0,05. Maka H_3 diterima, tindaklanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga.

4.5.3 Uji F

Menurut Ghozali & Ratmono (2020:56) “Uji F digunakan untuk mengetahui bahwa keseluruhan variabel independen bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang sering digunakan adalah 5 % atau 0,05 yang artinya adalah hasil penarikan kesimpulan memiliki kesempatan 95 % dan toleransi kesalahan sebesar 5 %.

Tabel Uji F

R-squared	0.855546	Mean dependent var	2.194444
Adjusted R-squared	0.789339	S.D. dependent var	1.470072
S.E. of regression	0.674732	Akaike info criterion	2.312198
Sum squared resid	10.92630	Schwarz criterion	2.840038
Log likelihood	-29.61956	Hannan-Quinn criter.	2.496428
F-statistic	12.92213	Durbin-Watson stat	2.054334
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari data tabel diatas uji F diatas dapat kita ketahui bahwa nilai F_{hitung} 10.54732, sedangkan F_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0, 05 dengan $df = (n-k-1) = 36 - 3 - 1 = 32$ yaitu F_{tabel} sebesar 2,90 atau $F_{hitung} > F_{tabel} = 12,92213 > 2,90$ atau probability F statistik < taraf signifikan atau 0,00000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa temuan audit, opini, dan tindaklanjut hasil audit secara simultan berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga

Berdasarkan hasil penelitian variabel pengaruh temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga, dan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Liu & Lin, 2012) dan (Sutiani, 2018) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi baik dipemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya temuan

yang ditemukan oleh auditor BPK baik temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan akan peraturan perundang – undangan maka menunjukkan kinerja yang buruk dari suatu instansi pemerintah sehingga kecurangan akan semakin mudah dan semakin terbukanya peluang untuk melakukan tindak kecurangan salah satunya korupsi dilakukan oleh para pejabat publik di instansi tersebut. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Rini & Damiati, 2017) yang menyatakan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi dikarenakan temuan audit salah satunya temuan kelemahan sistem pengendalian internal tidak mengakibatkan adanya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian material dalam pemerintah daerah

4.6.2 Pengaruh Opini audit terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian tabel terkait opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga. Penelitian ini mendukung penelitian (Utomo, Diana, & Afifudin, 2018) dan (Syahrir & Suryani, 2020). Semakin baik opini yang didapat oleh Kementerian/Lembaga, maka menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sehingga menunjukkan semakin rendah tingkat korupsi di Kementerian/ Lembaga. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rini & Damiati, 2017) yang menyatakan bahwa opini auditor tidak menjamin suatu pemerintah daerah melakukan tindak korupsi dikarenakan BPK hanya melihat apakah laporan keuangan pemerintah sudah tersaji secara wajar dan tata kelola keuangan sudah baik, dan juga dalam melakukan pemeriksaan yang diperiksa hanya sampelnya saja, bukan secara keseluruhan, dikarenakan keterbatasan waktu dan dana

4.6.3 Pengaruh Tindaklanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga

Berdasarkan data penelitian tindaklanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian Lembaga. Penelitian ini didukung oleh (Liu & Lin, 2012), (Masyitoh, Wardhani, & Setyaningrum, 2015). Semakin banyaknya temuan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga yang ditunjukkan dengan melakukan penyetoran/ penyerahan aset ke kas negara sebagai bentuk memperbaiki kesalahan atas pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga dan sebagai evaluasi kinerja kementerian/lembaga maka akan semakin rendah tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardahayati, Sarwani, & Hayat, 2019) yang menyatakan bahwa tindaklanjut masih harus lebih dipantau dalam penindaklanjutannya agar pemerintah provinsi benar – benar melakukan penindaklanjutan untuk mengurangi kerugian negara.

4.6.4 Pengaruh temuan audit, opini audit, dan tindaklanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian tabel 4.16 menunjukkan bahwa temuan audit, opini audit, dan tindaklanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Sutiani, 2018), (Liu & Lin, 2012). Bahwa pemeriksaan instansi yang dilakukan oleh BPK yang tertera dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yaitu temuan audit, opini auditor BPK dan tindaklanjut hasil pemeriksaan dapat mengindikasikan adanya kecurangan korupsi di kementerian/lembaga. Hal ini menunjukkan semakin baik kinerja Kementerian/Lembaga menunjukkan bahwa semakin sedikit temuan yang ditemukan, semakin baik opini yang didapatkan dan semakin tindaklanjut hasil audit BPK maka akan dapat mencegah ataupun mengindikasikan adanya kecurangan.

SIMPULAN

Berdasarkan pada data dan hasil dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Temuan audit memiliki nilai signifikan lebih kecil dibandingkan taraf signifikan yaitu $0,0441 < 0,05$ sehingga temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di

- Kementerian/Lembaga Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Liu & Lin (2012) dan Sutiani (2018)
- Opini mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dibanding dengan taraf signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga opini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Utomo, Diana, Affifudin (2018) dan Syahrir dan Suryani (2020)
 - Tindaklanjut hasil audit mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dibanding dengan taraf signifikan yaitu $0,0373 < 0,05$ sehingga tindaklanjut hasil audit berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Liu & Lin (2012) dan Masyitoh, Wardhani & Setyaningrum (2015)
 - Temuan audit, opini, tindaklanjut hasil pemeriksaan secara bersama – sama berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga.

SARAN

Untuk penelitian yang akan datang, peneliti memberikan masukan sebagai berikut :

- Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel yang lebih berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga
- Peneliti selanjutnya dapat memisah temuan kelemahan sistem pengendalian internal dengan ketidakpatuhan akan peraturan perundang – undangan untuk meneliti variabel mana diantara temuan tersebut yang mempengaruhi tingkat korupsi
- Variabel tindaklanjut hasil audit dapat diukur dengan pengukuran lain yaitu dengan mengukur rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang diberikan BPK

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 84 - 96.
- Baidi, R. (2019). Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1 - 12.
- Bastian, I. (2018). *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faisal, A. A. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Froud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 1-17.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, D. (2020, 12 06). *Juliari Batubara Jadi Tersangka, Total 4 Menteri di Era Jokowi yang Tersandung Kasus Korupsi*. Retrieved from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com>
- Husnah, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2016). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi(Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016 AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT. *e -proceeding of Management*, 1 - 6.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control : Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 163 - 186.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah tingkat II Tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 1-26.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 - 18.
- Ruslin. (2017). Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 -16.

- Shanti, Y. K., & Kusumawardhani, S. S. (2020). Pengaruh 3 Kecerdasan Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini dengan Pengalaman sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 1 - 15.
- Suhendar, K. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 1-14.
- Sutiani, A. (2018). Pengaruh Hasil Audit Pemerintahan dan Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Korupsi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Tingkat Korupsi di Indonesia. *e-prints.unpam.ac.id*, 1- 12.
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Temuan dan Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi (Study pada Pemerintah Daerah 2017). *Journal Accounting and Finance Universitas Telkom*, 1-9.
- Utomo, W. P., Diana, N., & Afifudin. (2018). Pengaruh Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Tingkat Korupsi (Study pada Kementerian/Lembaga di Indonesia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 1-12.
- Verawaty, Puspanita, I., & Sularti, E. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Daerah di Indonesia. *Journal Management, Business, and Accounting Binadarma*, 1-21.
- W, R. S., & Probohudono, A. N. (2015). Analisis Audit BPK RI terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan, dan Kerugian Negara. *Jurnal Antikorupsi*, 1-30.
- Wardahayati, Sarwani, & Hayat, A. (2019). Pengaruh opini Audit, Temuan Audit, Tindak lanjut Audit, serta Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Proceeding of National Conference on Asbis*, 1-22.
- Yuliyannah, I., & Setyaningrum, D. (2016). Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1 -26.
- Yuntho, E. (2019, 12 16). *Jangan (Ada Lagi) Korupsi di Kementerian*. Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/16/070500565/jangan-ada-lagi-korupsi-di-kementerian>